

Ketundukan kepada Pemimpin dalam Ketegangan Iman dan Keadilan: Studi Biblika dan Etika Publik Kristen Masa Kini

Harapan Nainggolan¹, Jhon Remofe Malau², Yosua Michael Nainggolan³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Teologi GPDI Pematang Siantar

Correspondence: harapannainggolan482@gmail.com

Abstract

The controversy over submission to leaders, both in the realm of the church and secular government, is a serious issue that demands in-depth theological and ethical studies. This study offers a critical approach through a qualitative study with a literature review method to examine historically, biblically, and socially how the legitimacy of leadership is understood and practiced, especially when the leader is repressive or corrupt. The results of the study show that the Bible emphasizes obedience to the government as part of the call of faith, but this obedience is not absolute, but must go hand in hand with ethical awareness and prophetic courage to reject injustice. The urgency of this study lies in true submission must be rooted in justice, moral integrity, and commitment to the values of the Kingdom of God, so that the church is a critical partner in building a just and dignified social order.

Keywords: submission; government; exploitation; call to obedience

Abstrak

Kontroversi ketundukan kepada pemimpin, baik dalam ranah gerejawi maupun pemerintahan sekuler, menjadi persoalan serius yang menuntut kajian teologis dan etis yang mendalam. Penelitian ini menawarkan pendekatan kritis melalui studi kualitatif dengan metode tinjauan pustaka untuk menelaah secara historis, biblika dan sosial bagaimana legitimasi kepemimpinan dipahami serta dipraktikkan, khususnya ketika pemimpin bersifat represif atau koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alkitab menekankan ketaatan kepada pemerintah sebagai bagian dari panggilan iman, namun ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus berjalan beriringan dengan kesadaran etis dan keberanian profetik untuk menolak ketidakadilan. Urgensitas dari penelitian ini terletak pada ketundukan yang benar harus berakar pada keadilan, integritas moral, dan komitmen pada nilai-nilai Kerajaan Allah, sehingga gereja sebagai mitra kritis dalam membangun tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

Kata Kunci: ketundukan; pemerintah; eksploitasi; panggilan ketaatan

PENDAHULUAN

Pondasi dari penelitian ini yang hendak kami bahas ialah bagaimana dialektika dari kontroversi ketundukan kepada pemimpin merupakan isu krusial yang terus menjadi perdebatan dalam ruang sosial, politik dan teologi gereja dalam kajian akademik. Paradigma yang hendak dilihat ialah bahwa ketundukan tidak sekadar dipahami sebagai kepatuhan administratif, tetapi persoalan dimensi etis, spiritual dan relasi kuasa yang kompleks. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kepemimpinan, baik dalam pemerintahan sekuler maupun gerejawi, sering kali berhadapan dengan problematika integritas dan

keadilan yang memunculkan resistensi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak menguraikan apakah ketundukan kepada pemimpin merupakan perintah ilahi yang tidak terbantahkan, ataukah sebuah ruang yang menuntut kesadaran etis dan keberanian profetik. Paradigma ini menjadi dasar untuk memahami ketegangan antara otoritas yang sah dan tanggung jawab iman dalam kehidupan bersama.

Kontroversi ketundukan kepada pemimpin menjadi salah satu polemik yang berkepanjangan dalam diskursus sosial dan religious, secara khusus kekristenan masa kini. Retorika terkait kepemimpinan saat ini sering kali ditentang secara radikal, yang bukan saja dikritik bahkan gugatan untuk pergantian pemimpin. Sebagai contoh di Indonesia, tidak jarang terjadi upaya hukum atau tuntutan publik yang bertujuan untuk mendesak pergantian pemerintahan, termasuk pemimpin tertinggi seperti presiden, serta melakukan restrukturisasi kabinet hingga pada level birokrasi terendah. Fenomena ini tentu didorong oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dinamika pemerintahan modern yang menjalankan kekuasaan dalam periode waktu tertentu, namun kerap kali menghadapi penolakan. Penolakan tersebut tidak muncul tanpa dasar, mengingat dalam sejarah peradaban, kepemimpinan kerap kali gagal menunjukkan konsistensi sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Fenomena ini dianggap lebih humanis, karena memperlihatkan bahwa pemimpin di mana saja, telah tersandera oleh kejahatan pemimpin masa lalu.

Realitas sosial yang akan kami paparkan ialah bagaimana pemimpin masa kini terlihat dikunci oleh standart yang sudah terbangun dalam paradigma masyarakat. Data umum yang ditampilkan oleh Sindo News¹ "*Dari Puncak Kekuasaan ke Belenggu Penjara: 6 Pemimpin Negara yang Dijebloskan Tahanan*" yang menunjukkan bahwa hukum dapat menyentuh siapa saja. Contoh seperti Nelson Mandela yang berbeda karena perjuangannya melawan 'apartheid' dan penahanannya selama 27 tahun mencerminkan ketidakadilan sistem apartheid daripada kesalahannya sebagai pemimpin. Mantan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dijatuhi hukuman penjara karena terjerat dalam skandal korupsi. Park Geun-hye, mantan Presiden Korea Selatan, dihukum karena skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meskipun dipercaya untuk membawa transparansi dan perubahan, justru terlibat dalam tindakan yang merusak kepercayaan publik. Hosni Mubarak, yang memerintah Mesir selama hampir tiga dekade sebelum digulingkan dan dihukum penjara, serta kasus Donald Trump yang didakwa atas dugaan upaya membatalkan hasil pemilu 2020.² Ini masih contoh sempit yang lebih umum, bagaimana

¹ Syarifudin, 'Dari Puncak Kekuasaan Ke Belenggu Penjara: 6 Pemimpin Negara Yang Dijebloskan Tahanan', *Sindo News*, 2023 <<https://international.sindonews.com/read/1189897/45/dari-puncak-kekuasaan-ke-belenggu-penjara-6-pemimpin-negara-yang-dijebloskan-tahanan-1693472888/14>> [accessed 19 July 2024].

² Syarifudin.

dengan Indonesia sendiri? Data menunjukkan bahwa perilaku pemimpin cukup mengguncang paradigma masyarakat terkait penghormatan. Bagaimana jika kita melihat dalam komunitas gereja? Penulis akan menguraikan apa yang disajikan oleh Rhoderick John S. Abellanosa,³ sebagai contohnya, Gereja Filipina, yang secara historis terlibat dengan kelas penguasa, memperpetuasi pola pikir feodal yang memperburuk penyalahgunaan. Ia juga mengkritisi penyalahgunaan di Gereja tidak terbatas pada pelanggaran seksual meliputi berbagai isu termasuk pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab dan pelaksanaan wewenang yang sewenang-wenang. Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa klerikalisme hanyalah gejala dari patologi yang lebih berbahaya dimana kenyamanan Gereja dengan privilese dan kekuasaan mereka sendiri. Gultom berpendapat realitas kepemimpinan bukan selalu dinilai berasal dari Tuhan dengan otoritas yang harus dihormati senantia, tetapi bagaimana konfirmatori biblis akan realitas keburukan dunia semakin hari (grafik kenaikan kejahatan dunia) dimana kondisi dunia semakin hari semakin jahat termasuk dalam soal kepemimpinan.⁴

Dalam sisi yang berbeda kami juga menemukan manipulasi terhadap teks-teks Alkitab oleh sekelompok elit birokrat untuk kepentingan politik dan fenomena ini juga telah terjadi sepanjang sejarah. Contoh yang paling mencolok adalah penggunaan agama (untuk mendukung rezim Nazi di Jerman) di bawah kepemimpinan Hitler.⁵ Para pemimpin Nazi menggunakan ayat-ayat Alkitab secara selektif mengukuhkan kedudukannya, membenarkan tindakan-tindakan otoriter, dan mempengaruhi rakyat agar tetap patuh dan tidak menentang rezim.⁶ Selain itu, di banyak negara Amerika Latin, terjadi juga praktik-praktik penindasan yang melibatkan gereja atau orang-orang Kristen dan bahkan institusi gereja bahkan menjadi alat untuk menjaga kekuasaan politik yang otoriter, mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan demi kepentingan politik sempit.⁷ Di Indonesia, kita juga melihat kecenderungan umum di mana banyak gereja atau umat Kristen tidak aktif dalam urusan-urusan sosial-politik (sekalipun dalam data minim). Fenomena ini menunjukkan bahwa manipulasi terhadap agama, termasuk Alkitab, dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam memperkuat kedudukan dan kekuasaan

³ Rhoderick John S. Abellanosa, 'Abuse, Elitism And Accountability: Challenges To The Philippine Church', *Asian Horizons* *HORIZONS*, 14.2 (2020), 361–80 <<https://dvkjournals.in/index.php/ah/article/view/2906>>.

⁴ Joni Manumpak Parulian Gultom, 'Kepemimpinan Pelayan Mengajarkan Teologi Memberi Di Kalangan Pekerja Migran Indonesia Di Gereja Lokal Malaysia', *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 5.1 (2022), 34–50 <<https://doi.org/10.53547/diegesis.v5i1.189>>.

⁵ Stanley R. Rambitan, *Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Takut Kepada Pemerintah?* (Jakarta: UKI, 2019) <[http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah Orang Kristen Takluk dan Takut kepada Pemerintah.pdf](http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah%20Orang%20Kristen%20Takluk%20dan%20Takut%20kepada%20Pemerintah.pdf)>.

⁶ Stanley R. Rambitan, *Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Takut Kepada Pemerintah?* (Jakarta: UKI, 2019).

⁷ Stanley Santoso, 'Sinagoge Pada Masa Intertestamental Dan Relevansinya Dengan Gereja Masa Sekarang', *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3.1 (2020), 48–65 <<https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i1.47>>.

pemerintah atau kelompok elit dalam melihat keterlibatan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran dalam konteks sosial dan politik bagi pemimpin. Sekarang akan tetap kembali kepada pertanyaan sentral: apakah menghormati pemimpin itu adalah merangkul keinginan Allah? Atau hanya legitimasi sisi lain dari Alkitab yang menunjukkan ketidak konsistenan akan nilai keadilan yang tidak memihak kepada orang-orang lemah dan tertindas.

Berdasarkan dua rumpun sosial gab ini, kami menilai bahwa baik dalam pemerintahan sekuler maupun pemerintahan dalam gereja (keterlibatan dalam agama atau keagamaan) tidak dapat menghindari kasus pemimpin bebas dari ketidakadilan dan integritas. Tidak lain bahwa pemerintah masih saja bulan-bulanan sumber persoalan bagi kepentingan masyarakat luas. Sehingga tidak salah jika kami menyebut penelitian ini dengan pondasi kontroversi jika masyarakat atau gereja diharapkan untuk tunduk kepada pemimpin semacam ini. Kasielli tampak lebih ringan dan lebih hati-hati dalam mengemukakan penolakannya terhadap pemimpin, dengan mengatakan bahwa ketika pemerintah bertentangan dengan kehendak Allah atau memerintahkan untuk melakukan hal yang melanggar prinsip-prinsip iman, umat Kristen diminta untuk memprioritaskan ketaatan kepada Allah. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Alkitab, di mana ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada ketaatan kepada manusia.⁸ Demikian juga dengan Paul menjelaskan bagian yang merusak integritas gereja ditengah bersepakat kepada kepemimpinan yang "beracun" yang sering kali ditandai oleh arogansi, otoritarianisme, dan ketidakmampuan untuk mendengarkan.⁹ Ia begitu vocal menyuarakan kepemimpinan dalam Gereja harus didasarkan pada otoritas moral yang kuat, karakter yang mulia, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan mendengarkan dengan baik. Tentu hal ini juga akan menimbulkan polemic yang baru bagi gereja sebab, kekristetang tidak akan pernah terlepas dari ideology sebuah Negara.

Penelitian sebelumnya telah mencoba membangun sebuah narasi tentang pemimpin atau pemerintahan yang terlihat bertentangan dengan kemasyarakatan. Herry dalam penelitiannya *Gereja Sebagai Umat Allah dan Rekan Negara*, menjelaskan bahwa pada hakekatnya gereja berada dibawah pemerintahan dan ia menekankan bahwa gereja bukan oposisi bagi Negara justru sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mengaktualkan damai: *shalom*.¹⁰ Demikian juga dengan Destiany dalam *studet papernya* menganalisis hubungan gereja pemerintah ditengah ketegangan marak persoalan nilai bahkan kepada masalah perijinan dan ketentuan yang

⁸ Kasieli Zebua and Mario Gani, 'Ketaatan Kepada Pemerintah Dalam Perspektif Perjanjian Baru', *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 3.1 (2023) <<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3574594>>.

⁹ Paul Avis, 'Authority and Leadership in the Church (Especially Diocese and Cathedral)', *Theology*, 123.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0040571X1989485>>.

¹⁰ Herry Susanto, 'Gereja Sebagai Umat Allah Dan Rekan Negara', *Jurnal Jaffray*, 17.1 (2019), 35 <<https://doi.org/10.25278/jj71.v17i1.298>>.

dibatasi bagi gereja, namun ia menilai bahwa bisa saja pemerintah yang kurang memahami identitasnya sebagai hamba Allah, namun sikap gereja kepada pemerintah harus dalam ketaatan.¹¹ Demikina juga dengan Alvary dan Julianti dalam penelitiannya yang berjudul *Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale* menjelaskan sikap gereja dalam panggilannya harus mencerminkan keterlibatan yang konstruktif dalam politik untuk mendukung kepentingan masyarakat dan mempromosikan keharmonisan sosial.¹² Sementara penelitian kami ini bukan hanya sebatas sikap gereja dalam kajian kontroversi antara ketundukan kepada pemerintah, namun dalam kajian teologisnya terdapat beberapa elemen kunci dibalik ketundukan atau ketaatan kepada pemerintah seperti upah dibaik ketaatan, panggilan, tanggung-jawab sebagai kewajiban.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang diperkaya dengan analisis biblika dan gramatikal-teologis. Pendekatan ini kami pilih untuk mengkaji secara mendalam persoalan ketundukan kepada pemimpin dalam konteks kekristenan, baik dalam ranah gerejawi maupun pemerintahan sekuler, khususnya dalam kaitannya dengan dilema etis, legitimasi otoritas, dan spiritualitas kenabian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang kredibel, baik dari jurnal akademik, literatur teologis, Alkitab, serta artikel daring yang relevan dan kontekstual. Kami melakukan analisis secara sistematis dan kritis terhadap literatur yang ada, disertai penelaahan terhadap struktur bahasa asli teks Alkitab, seperti dalam Roma 13:1, Ibrani 13:17, dan 1 Petrus 2:18, guna menggali makna teologis yang terkandung secara lebih autentik. Pendekatan gramatikal ini memungkinkan eksplorasi yang lebih tepat terhadap studi gramatikal akan kata tertentu yang ada dalam Alkitab mengenai otoritas dan ketaatan, sekaligus menyoroti nuansa etis dan spiritual di dalamnya. Proses analisis meliputi tahapan identifikasi isu, pemetaan dilema teologis, pembacaan teks secara ekspositori, hingga perumusan sintesis yang merefleksikan ketegangan antara iman, kekuasaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini bukan saja bersifat deskriptif-teologis, tetapi juga reflektif-kritis, sehingga mampu menawarkan kontribusi konseptual yang signifikan bagi wacana teologi publik dan praksis etis dalam kehidupan berbangsa dan bergereja.

¹¹ Lea Destiany, 'Hubungan Gereja Dengan Pemerintah : Studi Historis Kritis Roma 13:1-7 Dan Wahyu 13, Serta Relevansinya Bagi Kehidupan Gereja Masa Kini Di Indonesia' (Universitas Duta Wacana, 2021) <<https://katalog.ukdw.ac.id/4893/>>.

¹² Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, 'Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale', *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 4.1 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketaatan Kepada Pemerintah

Secara historis, ajaran mengenai ketaatan kepada pemerintah telah tercatat dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama Alkitab, di mana prinsip tersebut diperkuat melalui keteladanan Yesus Kristus dan para Rasul serta banyak tokoh dalam Perjanjian Lama sebagai wujud nyata dari sikap tunduk terhadap otoritas yang berlaku. Kemudian, fenomena teologis ini berubah menjadi salah satu aspek fundamental bagi gereja dalam dasar teologis dan praktis antara hubungan gereja dengan otoritas pemerintahan hingga pada saat ini. Bagi Simanjuntak dalam otoritas sebuah kepemimpinan ialah tautan cara Tuhan memilih untuk bekerja dengan Umat Tuhan.¹³ Ia juga melihat bahwa gereja masa kini dipanggil bukan saja soal jabatan fungsionalnya tetapi melihat atribut yang melekat dalam dirinya baik itu karakter maupun keteguhan iman. Gultom melihat lebih jauh realitas kepemimpinan itu justru sebagai *lifestyle* yang menjadi sebuah terobosan secara khusus dalam transformasi dan peradaban manusia yang semakin kompleks.¹⁴ Sederhananya, gereja adalah umat yang dipanggil Allah untuk tunduk kepada pemerintah.

Yesus menjadi pancang kekuatan gereja untuk menghormati pemerintah. Satu kali Yesus berkata *...berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar...kepada Allah apa yang menjadi milik Allah* (Mat.22:21). Tampaknya Yesus bukan saja mengerjakan ketaatan aturan Negara dalam hal pajak. Jika dari latar belakang historisnya, Yesus sedang menjawab pertanyaan orang Farisi (yang ingin menjebak Yesus). Namun orang Farisi harus ditinjau dari segi konteks bahwa mereka adalah sebuah sekte yang terasing dari komunitas yang sama di Yahudi dengan standart ketaatan terhadap ritus keagamaan yang tinggi, seperti kesalehanpuasa, doa sedekah.¹⁵ Sekalipun demikian mereka inilah musuh bebuyutan Yesus Kristus sehingga dalam pertanyaan tersebut, sebenarnya potensi untuk menyalahkan Yesus itu sangatlah tinggi.

Dengan demikian, ajaran ketaatan kepada pemerintah bukanlah sekadar dorongan moral untuk patuh secara administratif, melainkan sebuah prinsip teologis yang berakar pada pengakuan terhadap otoritas ilahi di balik struktur sosial. Keteladanan Yesus dalam menavigasi ketegangan antara kekuasaan politik dan ketaatan spiritual menjadi fondasi bagi gereja dalam membangun relasi dengan negara. Namun, ketundukan yang diajarkan bukanlah tanpa syarat; Ia menuntut kebijaksanaan iman untuk membedakan antara kepatuhan yang lahir dari iman, dan tunduk yang membungkam nurani.

¹³ Fredy Simanjuntak and others, 'Dari Spiritualitas Kepada Moralitas: Pelajaran Kepemimpinan Dari Kehidupan Yusuf', *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 2.2 (2021), 251-75 <<https://doi.org/10.47530/edulead.v2i2.79>>.

¹⁴ Joni Manumpak Parulian Gultom, Martina Novalina, and Didimus Sutanto B Prasetya, 'Kepemimpinan Pelayan Dalam Membangun Lifestyle Spiritual Generasi Digital', *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 6.1 (2022), 33-50 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v6i1.341>>.

¹⁵ Alkitab Sabda, 'Farisaioiv Pharisaiois', *Alkitab Sabda* <<https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=farisi>> [accessed 23 August 2024].

Legitimasi Kekuasaan: Analisis Biblika atas Otoritas yang Menindas

Jika diteliti satu persatu-persatu tampaknya ini bukan hanya sekedar mencoba Yesus untuk mencari kesalahan semata. Pertanyaan orang Farsi adalah ...*apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar...* Secara historis sosial politik Yahudi berada dibawah kekaisaran Romawi. Sehingga pemimpin tertinggi adalah kaisar (yang pada zaman Yesus adalah Tiberius Caesar). Sementara dalam masyarakat Yahudi otoritas Kaisar dianggap sebagai penindas (bandingkan juga dengan Herodes yang memerintah pembantaian besar-besaran terhadap bayi laki-laki di Israel, Mat.2:16-18). Namanya dibawah kekuasaan, maka membayar pajak adalah kewajiban. Namun tanggapan Yesus terlihat berbeda, dengan jawaban*berikan kepada kaisar,,,,berikan kepada Allah...* Hal ini tidak terlepas dari aturan nenek moyang (Israel) yang dalam kitab Imamat berisi tatanan hokum dan peraturan yang diwajibkan bagi umat Allah. Namun istilah ...*berikan...* bukanlah perintah opsioanal, tetapi sebuah keharusan. Jadi dari sisi Yesus, jawaban atas pertanyaan orang Farisi adalah navigasi kewajiban kepada pemerintah yang harus disejajarkan dengan keagamaan dan ini adalah perintah. Sementara pertanyaan Farisi tendensius yang bukan saja untuk menjebak Yesus tetapi usaha untuk mendapatkan jawaban yang yang merendahkan kaisar. Sekali lagi, dalam fenomenal ini, kedatangan Yesus bukan saja secara 'Rohani' tetapi rohani dalam bernegara melalui ketundukan kepada otoritas pemerintah sekalipun pemerintah dalam otoritas penindas.

Dalam konstruk pembahasan yang kompleks kitab Kitab Ibrani menyisipkan satu topik penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehadiran pemimpin dan ini sangat berharga. Pasanya bahwa "masyarakat adalah ketaatan kepada pemimpin" (sebagai penekanan penulis). Ibrani.13:17 dalam terjemahan baru "*Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka...*" Kalimat-kalimat penegasan dalam Alkitab tentu berdasar pada konteks yang berlangsung. Dalam koteks terdekat yang bisa kita amati adalah bahwa pernyataan "ketundukan/ketaatan" kepada pemimpin adalah salah satu tema dari kekudusan (Ibr.12 dan 13) sehingga implikasi akan merujuk kepada banyak hal, salah satunya pelaksanaan kekudusan (bdk, Nasehat untuk bertekun¹⁶). Jika melihat eksposisi ayat, kata Taatilah: *πειθω* (*peitho*) berarti: membujuk, meyakinkan, atau mematuhi. Dalam bentuk pasif, kata ini sering diartikan sebagai "taat" atau "dipengaruhi." Sementara kata "pemimpin" (sebagai junjungan yang harus dihormati): *τοῖς ἡγουμένοις* (*tois hegoumenois*) merujuk pada pemimpin-pemimpin jemaat. Kata ini sering diterjemahkan sebagai: pemimpin, pembimbing, atau orang yang bertanggung jawab.¹⁷ Jadi secara eksplisit ayat ini sedang menyuarakan ketaatan seluruh jemaat (konteks orang Kristen Yahudi) kepada pemimpin yang bertanggung-jawab atas

¹⁶ 'Garis Besar Ibrani', *Sabda* <<https://alkitab.sabda.org/article.php?id=124>> [accessed 23 July 2024].

¹⁷ 'Hebrews 13:17', *Bible Hub* <<https://biblehub.com/text/hebrews/13-17.htm>> [accessed 23 July 2024].

kerohanian (bahasa klasik: pemimpin rohani) yang dilain sisi menyiratkan pemeliharaan hubungan jemaat kepada pemimpin dengan indikasi kebenaran yaitu ketaatan.

Kasus lain akan kita temukan dalam kitab Roma.13:1 TB *“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.”* Jika dibedah, maka yang pertama adalah kata *“tiap-tiap orang”* dalam Biblel HUB Πᾶσα (*Pasa*): Semua; Setiap, ψυχῆ (*psychē*): Orang; jiwa, ἐξουσίας (*exousiais*): *“Otoritas”* atau *“pemerintah”*, sementara ὑπερεχούσας (*hyperechousais*): Bentuk kata: Partisip presens aktif berarti *“semua Yang berada di atas”* atau *“lebih tinggi”* dan ὑποτασέσθω (*hypotassesthō*): Bentuk kata: Kata kerja, modus pasif, imperatif, orang ketiga tunggal yang diartikan *“Harus takluk”* atau *“biarlah tunduk”*.¹⁸ Secara tata bahasa pemerintah (otoritas) dan ketundukan adalah penegasan akan *“sikap menundukkan diri”* atau *“kepatuhan”*. Tampak ini bukan sekalis nasehat untuk bersikap takluk dalam sebuah ketundukan, Munatar Kause tampak lebih propokatif dalam interoretasi ayat dengan mengatakan bahwa konsep *“tunduk”* atau *“takluk”* adalah sebuah panggilan, tindakan yang harus dipatuhi semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen. Sikap tunduk ini diartikan sebagai kewajiban mutlak tanpa terkecuali, mencerminkan kehendak Tuhan bagi setiap jiwa yang hidup.¹⁹ Namun demikian, Paulus menyampaikan nasihat ini kepada orang Kristen di Roma, bahwa status kekristenan tidak membebaskan mereka dari kewajiban terhadap Negara dan pemerintah dipandang sebagai institusi yang berasal dari Allah dan ditetapkan oleh-Nya.²⁰ Secara eksplisit menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas yang berasal dari Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Paulus menjelaskan bahwa melawan pemerintah sama artinya dengan melawan Allah sendiri.

Kitab Petrus juga menuliskan satu frasa yang cukup signifikan dengan konteks ketundukan, namun ini tampak lebih mengandung unsur paksaan. 1 Petrus.2:18 TB *“Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis.”* Tampak janggal sekali dengan menyuruh tunduk kepada yang bukan baik, tetapi juga bengis (ketundukan yang tanpa memandang status tinggi rendahnya nilai kemanusiaan oleh tuannya) artinya selama itu masih pemimpin yang disebut tuan, wajib taat dalam kepatuhan! Sekalipun ini konteksnya adalah budak Οἱ οἰκέται (*hoi oiketai*): dengan arti dasar *“budak rumah tangga”* (bentuk kata nominatif, maskulin, jamak) tentu ini sangat

¹⁸ ‘Romas 13:1’, *Bible Hub* <<https://biblehub.com/text/romans/13-1.htm>> [accessed 24 July 2024].

¹⁹ Munatar Kause, ‘Kajian Teologis Tentang Kehidupan Kristen Dalam Berbangsa Dan Bernegara: Refleksi Teologis Roma 13:1-7’, *Jurnal Teruna Bhakti*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47131/jtb.v4i1.98>>.

²⁰ Munatar Kause, ‘Kajian Teologis Tentang Kehidupan Kristen Dalam Berbangsa Dan Bernegara: Refleksi Teologis Roma 13:1-7’, *Jurnal Teruna Bhakti*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47131/jtb.v4i1.98>>.

mengganggu pikiran orang Indonesia (termasuk penulis) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diatur dalam UUD tentang hak azasi manusia (HAM). Sementara ketundukan yang dimaksud ialah panggilan Petrus kepada semua hamba dalam ketundukan dengan penuh ketakutan ἐν παντί φόβῳ (*en panti phobō*) dengan bentuk kata preposisi *en*: dalam, παντί φόβῳ: segala ketakutan/rasa hormat.²¹ Ini adalah ketetapan sikap hormat dan ketundukan yang tulus, bukan hanya tindakan luar yang kosong (penegasan penulis).

Teologi dalam Otoritas dan Pemerintah

Melihat dari sisi etimologinya, kata otoritas dalam bahasa Inggris Kuno berasal dari istilah *autorite* dan *auctorite* (dari bahasa Inggris-Prancis) yaitu *autorité* dan *auctorité* (bahasa Latin), yaitu *auctōritāt-* atau *auctōri* (konteks Latin), *auctōritās* tidak hanya sekadar berarti hak kepemilikan atau sanksi, tetapi juga mencakup kekuatan *yang sah* untuk memberikan otorisasi dan persetujuan.²² Esensi dari *auctōritās* adalah kekuatan yang mendalam dan meyakinkan yang berasal dari otoritas seseorang atau entitas dalam mengatur, mempengaruhi, atau mengendalikan.²³ Secara sederhana suatu kekuasaan tanpa otoritas yang mekat tentu tidak memiliki kekuatan, dan itu pun tidak sah (secara defenitif). Sementara pemerintahan didalamnya selalu ada elemen yang melekat yang tidak dipisahkan yaitu kekuasaan dan kedaulatan. Artinya otoritas akan saling terkait dengan antar kedaulatan dan kekuasaan secara serentak melekat pada pemerintah yang sedang memerintah. Konsep ini memiliki tidak berdiri sendiri untuk kepentingan pemerintah (seolah pemerintah yang memegang kendali dengan legitimasi kesuka-sukaan). Jika kami melihatnya di Indonesia (sebagai sampel redaksi studi kata ini) tentu ini akan diterapkan atas dasar system pemerintahan demokratis di mana kekuasaan rakyat dalam memilih pemimpin kedaulatan (misalnya dalam Pemilihan umum). Namun jika hal otoritas ini dilihat dalam system pemerintahan otoriter kekuasaan penuh terpusat pada pemerintah (terlepas itu pada keadaan rakyat yang dipimpin yang sejahtera, atau lemah). Muhtar dan Firdaus menganalisis kekuasaan dan kedaulatan bagi yang memerintah mencoba menerangkan bahwa didalam system pemerintahan yang dibangun dalam kekuasaan untuk mengelola sebuah Negara rakyat yang mendorong pemimpin supaya pemimpinnya bertanggung-jawab dan berpihak kepada rakyat dengan tujuan kepentingan rakyat.²⁴ Jadi apapun itu istilahnya, otoritas yang dimiliki pemerintah hanya berlanskan dari yang dipimpin (rakyat). Artinya otoritas memiliki tujuan dan terhimpun dalam kekuatan rakyat yang harus disejahterakan.

²¹ '1 Peter 2:18', *Bible Hub* <https://biblehub.com/text/1_peter/2-18.htm> [accessed 24 July 2024].

²² Dictionary, 'Authority', *Merriam Webster* <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/authority#dictionary-entry-1>> [accessed 27 August 2024].

²³ Dictionary.

²⁴ Muhtar Habbodin and Mohamad Firdaus, 'Kekuasaan Dan Kedaulatan Memerintah', *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3.1 (2022), 50–62 <<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.166>>.

Kekuatan yang sah (otoritas) yang dimiliki oleh pemerintah adalah keniscayaan namun ia sendiri dibatasi (baik itu secara territorial, ras, agama dan lain sebagainya). Otoritas memang adalah wewenang yang membawa kepada satu kewajiban tanggung jawab (diemban). Sehingga otoritasnya memiliki kekuatan untuk menegakkan kewibawaan, yang esensial bagi tercapainya tujuan kelompok. Sekali lagi itu terbatas, namun ada satu otoritas yang tampak lebih inklusif dan tidak semua orang menerimanya. Kami menyebutnya Otoritas dari yang Ilahi, sebab berasal dari Dia (yang Ilahi itu). Jika kami mengulang pembahasan (dengan sub tema ketaatan kepada pemerintah diatas)...*tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya* (Roma 13:1-2 TB). Jika diperhatikan lebih dalam, ketetapan-Nya adalah tunduk kepada siapapun itu, yang penting memiliki identifikasi pemerintah. Kemudian, siapa yang melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Jika kami menyebut (menggambarkan hal ini) lebih radikal, semua yang masih menganggap dirinya sebagai Kristen wajib tunduk kepada pemerintah dan ini adalah panggilan. *Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang* (Titus.3:1-2).

Tentu hal ini kelihatan sebagai teologi yang 'bengkok' (bandingkan dengan: ...*kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, Kis.5:29*) yang tampak terlihat berpihak kepada pemerintah dan bukan kepada rakyat (seperti ulasan etimologi otoritas). Dimensi ini memang terlihat cacat (untuk kepentingan humanis) namun dalam cakupan yang lebih luas Alkitab tidak menerjemahkannya dalam penggalan tersebut. Yonatan mengatakan Otoritas adalah anugrah Tuhan kepada manusia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kehendak bebas sesuai dengan rencana ilahi.²⁵ Sesungguhnya otoritas dalam pembahasan ini tidak dalam batasan untuk penghormatan pemerintah semata, namun bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa otoritas yang berasal dari siapa dan kepada siapa otoritas diberikan dan untuk apa. Jadi sekalipun sejarah memperlihatkan banyak otoritas itu disalah gunakan (barang kali atas dasar ketidak sadaran pemerintah akan karunia yang diberikan) harus dilihat bagaimana pemerintah harus berdiri dipihak Tuhan untuk merangkul tujuan-Nya atas ciptaan-Nya.

²⁵ Yonatan Alex Arifianto, Carolina Etnasari Anjaya, and Andreas Joswanto, 'Kajian Teologis Atas Konsep Otoritas Dalam Matius 25:14-30 Dan Refleksinya Bagi Kepemimpinan Gereja Era Digital', *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2.2 (2023), 167-80 <<https://doi.org/10.54592/jct.v2i2.114>>.

Menggunakan standart kepemimpinan Alkitab dengan menggunakan otoritas yang benar (dari otoritas Ilahi) memang tidak memiliki padanan dengan konsep kerja dunia ini. Sebagai contoh dalam Teologi Kristen maka akan mengedepankan unsur *theos*-nya dimana semua system yang terbangun untuk kepentingan apapun itu selalu berkiblat kepada apa yang Tuhan mau (terlihat ini tampak ceramah yang lumrah) namun ini benar. Posisi pemimpin itu sederhananya: penuh kasih (Yoh.21:19-21) yang dalam bidang yang lain, pemimpin itu sebagai gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba (Yoh.10:11) dan barang siapa ingin menjadi pemimpin (yang besar) ia harus menjadi pelayan (Mark.10:43-45).²⁶ Namun ada satu hal dibalik model pemimpin yang Alkitabiah ini bahwa sesungguhnya pemimpin itu tidak memimpin dengan otoritasnya sendiri namun letak otoritasnya bergantung kepada siapa yang menyuruhnya untuk memimpin. Pemimpin adalah perpanjangan tangan Tuhan yaitu wakil-sebagi wakil-Nya.²⁷ Sesungguhnya yang memerintah bukanlah pemerintah yang terlihat melainkan Allah yaitu Yesus Kristus melalau manusia. Mat.23:10 “janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias.” Hal ini parallel dengan apa yang dikatakan Yesus (sebagai kekuatan dari Amanat Agung)...*kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi...*(Mat.28:28).

Problematika Etis Keadilan dalam Teologi Publik

Kekristenan tidak memaknai ketundukan kepada pemerintah sebagai kepatuhan buta, melainkan sebagai panggilan spiritual dalam sistem nilai-nilai etis dan teologis. Keller dalam *Life in the Gospel* bahwa Injil itusen diri hadir sebagai sosok Juruselamat yang menggunakan otoritas-Nya bukan untuk menindas, melainkan untuk melayani bahkan rela menderita demi keselamatan umat manusia.²⁸ Ini adalah panggilan untuk teladan umat Kristen diundang untuk mengelola kekuasaan secara bertanggung jawab dengan integritas moral dan kejernihan intelektual dalam keselarasan yang koheren pada kesejajaran histori Yesus yang tanpa tanpa terjebak dalam praktik eksploitasi.

Dalam Roma 13 (pada analisis gramatikal sebelumnya), Paulus menegaskan bahwa pemerintah adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah untuk menciptakan keteraturan sosial dan menegaskan keadilan. Ketundukan kepada otoritas bukan sekadar kewajiban sipil, tetapi juga ekspresi iman yang menghargai tatanan ilahi dalam kehidupan berbangsa. Kendati demikian,

²⁶ Rismag Dalena Monica Br Manurung Manurung and others, ‘Analisis Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Markus 10:43-45 Dan Implementasinya Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat Di Masa Pandemi’, *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 2.1 (2022), 20–31 <<https://doi.org/10.54170/dp.v2i1.84>>.

²⁷ Binsar Hutasoit, ‘Pemimpin Yang Membawa Pembaharuan’, *Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa* <<https://www.sttpb.ac.id/homepage/berita-pemimpin-yang-membawa-pembaharuan.html>> [accessed 27 August 2024].

²⁸ Timothy Keller, ‘Justice in the Bible’, *Life In The Gospel*, 2020 <<https://wmorehouse.com/wp-content/uploads/2020/10/Justice-in-the-Bible.pdf>>.

perintah untuk tunduk tersebut kerap berhadapan dengan dilema moral, khususnya ketika kekuasaan yang ada menunjukkan sifat represif, koruptif, atau bertindak di luar prinsip keadilan. Di sinilah muncul perdebatan kritis: apakah ketundukan tetap berlaku ketika pemerintah gagal mencerminkan karakter Allah? Maka prinsip keadilan Alkitabiah baik retributif maupun restorative menjadi kerangka penilai yang menuntut agar ketundukan selalu dibarengi dengan keberanian profetik untuk menegakkan keadilan, membela yang tertindas, dan menolak kekuasaan yang menyimpang dari moralitas Allah.

Di sisi lain, identitas pemerintah dalam pandangan Kristen bukan hanya soal kekuasaan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etis. Pemimpin ideal, menurut Alkitab dan pemikir seperti Herman Bavinck serta Tim Keller, adalah mereka yang menegakkan martabat manusia dan memerintah berdasarkan nilai-nilai kasih, kebenaran, dan kesetaraan.²⁹ Gereja dan orang percaya dipanggil untuk hidup dalam relasi aktif dengan pemerintah: menghormati dan menaati hukum, namun tetap setia kepada prinsip iman dan keadilan Tuhan. Dalam ketegangan antara iman dan negara, Yesus sendiri memberikan prinsip navigasi: *"Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah."* Pernyataan ini tidak hanya membagi dua wilayah otoritas, tetapi juga menegaskan bahwa ketaatan kepada negara tidak boleh melampaui loyalitas kepada Tuhan. Maka, ketundukan Kristen bersifat terbatas, kritis, dan berakar dalam kasih, keadilan, serta pemulihan umat manusia.

Kritik Profetik dan Kepatuhan

Sebagai praktisi, kami menyatakan keterhubungan persoalan ketundukan dalam kritik kegerejaan masa kini dengan menyebut kritik profetik. Kritik profetik dan kepatuhan dalam iman Kristen tentunya harus dimulai dari pemahaman bahwa relasi antara gereja dan negara merupakan ruang dialektis di mana tanggung jawab spiritual dan moral umat percaya diuji dalam ketegangan antara penghormatan terhadap otoritas yang sah dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran ilahi di tengah praktik kekuasaan yang kerap kali menjauh dari nilai-nilai Kerajaan Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, iman Kristen memandang ketundukan terhadap pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab etis dan spiritual yang berlandaskan pada keyakinan teologis bahwa seluruh otoritas pada hakikatnya berasal dari Allah (Roma 13:1). Namun, ketundukan ini tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat pada keadilan, kebenaran, dan kesesuaian dengan karakter Allah. Ketika pemerintah bertindak tidak adil atau menyalahgunakan kekuasaan, orang percaya dipanggil untuk menilai secara kritis dan tetap teguh pada prinsip kasih dan kebenaran ilahi. Oleh karena itu, sikap tunduk harus

²⁹ Keller.

disertai kesadaran etis, bahwa iman tidak membenarkan ketidakadilan, tetapi menuntut integritas, keberanian profetik, dan komitmen pada keadilan sosial.

Secara praktis, hal ini berarti bahwa orang Kristen harus menjadi warga negara yang aktif, taat hukum, namun tidak apatis terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Kerajaan Allah. Ketundukan kepada pemerintah tidak menghapus suara kenabian gereja, justru sebaliknya, menjadi wadah untuk menyuarakan keadilan, melindungi martabat manusia, dan menjaga keseimbangan antara iman dan tanggung jawab sosial. Dalam terang Injil, pemerintah dipandang bukan sebagai alat dominasi, tetapi sebagai mitra dalam mewujudkan kebaikan bersama yang mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ketundukan kepada pemimpin, baik dalam gereja maupun pemerintahan sekuler, adalah panggilan iman yang memiliki dasar teologis yang kuat, namun tidak bersifat mutlak. Ketaatan yang diajarkan Alkitab menuntut kesetiaan kepada Allah yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan buta kepada pemimpin, khususnya ketika pemimpin bertindak melawan prinsip keadilan dan kebenaran. Pembahasan menegaskan bahwa otoritas pemerintah diakui sebagai bagian dari ketetapan Allah, namun gereja dan umat Kristen dipanggil untuk menjadi suara profetik yang kritis ketika kekuasaan disalahgunakan. Kontroversi ketundukan ini mengajak gereja untuk tidak bersikap apatis, melainkan aktif dalam menyuarakan keadilan sosial dan memperjuangkan martabat manusia. Dengan demikian, ketundukan Kristen harus dipahami sebagai tanggung jawab etis yang terikat pada kasih, keadilan, dan integritas, bukan sebagai legitimasi bagi kepemimpinan yang menindas. Gereja masa kini diharapkan mampu mempraktikkan sikap tunduk yang kritis, aktif, dan transformatif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

REFERENSI

'1 Peter 2:18', *Bible Hub* <https://biblehub.com/text/1_peter/2-18.htm> [accessed 24 July 2024]

Abellanosa, Rhoderick John S., 'Abuse, Elitism And Accountability: Challenges To The Philippine Church', *Asian Horizons HORIZONS*, 14.2 (2020), 361–80 <<https://dvwjournals.in/index.php/ah/article/view/2906>>

Alkitab Sabda, 'Farisaiov Pharisaios', *Alkitab Sabda* <<https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=farisi>> [accessed 23 August 2024]

Arifianto, Yonatan Alex, Carolina Etnasari Anjaya, and Andreas Joswanto, 'Kajian Teologis Atas Konsep Otoritas Dalam Matius 25:14-30 Dan Refleksinya Bagi Kepemimpinan Gereja Era Digital', *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2.2 (2023), 167–80

- <<https://doi.org/10.54592/jct.v2i2.114>>
Avis, Paul, 'Authority and Leadership in the Church (Especially Diocese and Cathedral)', *Teology*, 123.2 (2020)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0040571X1989485>>
Destiany, Lea, 'Hubungan Gereja Dengan Pemerintah : Studi Historis Kritis Roma 13:1-7 Dan Wahyu 13, Serta Relevansinya Bagi Kehidupan Gereja Masa Kini Di Indonesia' (Universitas Duta Wacana, 2021)
<<https://katalog.ukdw.ac.id/4893/>>
Dictionary, 'Authority', *Merriam Webster* <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/authority#dictionary-entry-1>> [accessed 27 August 2024]
'Garis Besar Ibrani', *Sabda* <<https://alkitab.sabda.org/article.php?id=124>> [accessed 23 July 2024]
Gultom, Joni Manumpak Parulian, 'Kepemimpinan Pelayan Mengajarkan Teologi Memberi Di Kalangan Pekerja Migran Indonesia Di Gereja Lokal Malaysia', *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 5.1 (2022), 34–50
<<https://doi.org/10.53547/diegesis.v5i1.189>>
Gultom, Joni Manumpak Parulian, Martina Novalina, and Didimus Sutanto B Prasetya, 'Kepemimpinan Pelayan Dalam Membangun Lifestyle Spiritual Generasi Digital', *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 6.1 (2022), 33–50 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v6i1.341>>
Habbodin, Muhtar, and Mohamad Firdaus, 'Kekuasaan Dan Kedaulatan Memerintah', *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3.1 (2022), 50–62 <<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.166>>
'Hebrews 13:17', *Bible Hub* <<https://biblehub.com/text/hebrews/13-17.htm>> [accessed 23 July 2024]
Hutasoit, Binsar, 'PEMIMPIN YANG MEMBAWA PEMBAHARUAN', *Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa* <<https://www.sttpb.ac.id/homepage/berita-pemimpin-yang-membawa-pembaharuan.html>> [accessed 27 August 2024]
Kause, Munatar, 'Kajian Teologis Tentang Kehidupan Kristen Dalam Berbangsa Dan Bernegara: Refleksi Teologis Roma 13:1-7', *JURNAL TERUNA BHAKTI*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47131/jtb.v4i1.98>>
— — —, 'Kajian Teologis Tentang Kehidupan Kristen Dalam Berbangsa Dan Bernegara: Refleksi Teologis Roma 13:1-7', *Jurnal Teruna Bhakti*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47131/jtb.v4i1.98>>
Keller, Timothy, 'Justice in the Bible', *Life In The Gospel*, 2020 <<https://wmorehouse.com/wp-content/uploads/2020/10/Justice-in-the-Bible.pdf>>
Manurung, Rismag Dalena Monica Br Manurung, Jenri Prada Sibarani, Jaya Supan, Fransiskus Irwan Widjaja, and Talizaro Tafonao, 'Analisis Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Markus 10:43-45 Dan Implementasinya Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat Di Masa Pandemi',

- Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*, 2.1 (2022), 20–31
<<https://doi.org/10.54170/dp.v2i1.84>>
- Rambitan, Stanley R., *HARUSKAH ORANG KRISTEN TAKLUK DAN TAKUT KEPADA PEMERINTAH?* (Jakarta: UKI, 2019)
<[http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah Orang Kristen Takluk dan Takut kepada Pemerintah.pdf](http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah%20Orang%20Kristen%20Takluk%20dan%20Takut%20kepada%20Pemerintah.pdf)>
- — —, *Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Takut Kepada Pemerintah?* (Jakarta: UKI, 2019)
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu, 'Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale', *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 4.1 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>>
- 'Romans 13:1', *Bible Hub* <<https://biblehub.com/text/romans/13-1.htm>> [accessed 24 July 2024]
- Santoso, Stanley, 'Sinagoge Pada Masa Intertestamental Dan Relevansinya Dengan Gereja Masa Sekarang', *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3.1 (2020), 48–65
<<https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i1.47>>
- Simanjuntak, Fredy, Irfan Feriando Simanjuntak, Fransiskus Irwan Widjaja, Yudhy Sanjaya, and Johannes Tarigan, 'Dari Spiritualitas Kepada Moralitas: Pelajaran Kepemimpinan Dari Kehidupan Yusuf', *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 2.2 (2021), 251–75
<<https://doi.org/10.47530/edulead.v2i2.79>>
- Susanto, Herry, 'Gereja Sebagai Umat Allah Dan Rekan Negara', *Jurnal Jaffray*, 17.1 (2019), 35 <<https://doi.org/10.25278/jj71.v17i1.298>>
- Syarifudin, 'Dari Puncak Kekuasaan Ke Belenggu Penjara: 6 Pemimpin Negara Yang Dijebloskan Tahanan', *Sindo News*, 2023
<<https://international.sindonews.com/read/1189897/45/dari-puncak-kekuasaan-ke-belenggu-penjara-6-pemimpin-negara-yang-dijebloskan-tahanan-1693472888/14>> [accessed 19 July 2024]
- Zebua, Kasieli, and Mario Gani, 'Ketaatan Kepada Pemerintah Dalam Perspektif Perjanjian Baru', *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 3.1 (2023)
<<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3574594>>